

KEWENANGAN PERAWAT DALAM TINDAKAN SIRKUMSISI PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI

INTISARI

Surono Heru Winoto¹, Dwi Haryati²

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan perawat dalam tindakan sirkumsisi dan perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan sirkumsisi pada praktik keperawatan mandiri.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Purworejo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tata cara *non probability (non random) snowball sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian ini perawat praktik mandiri tidak memiliki kewenangan dalam tindakan sirkumsisi kecuali pada keadaan keterbatasan tertentu yaitu darurat dan tidak adanya tenaga medis yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan sirkumsisi yang dilakukan oleh perawat pada praktik keperawatan mandiri di Kabupaten Purworejo belum terlaksana sesuai asas legalitas dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Kewenangan, Perawat, Sirkumsisi

¹ Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Program Studi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

NURSING AUTHORITY IN CIRCUMCISION ACTION OF INDEPENDENT PRACTICE NURSE

ABSTRACT

Surono Heru Winoto³, Dwi Haryati⁴

The purpose of this research is to know and analyze the authority of the nurses in the act of circumcision and legal protection for the community for circumcision actions in independent nursing practice.

This research is empirical normative research. The data that obtained from the study were analyzed qualitatively. The result of the data analysis are presented descriptively. The study was conducted in Purworejo regency. The sampling technique that uses in this research is non probability snowball sampling.

Based on the results of this study nurses independent practice has no authority in the act of circumcision except in the state of certain limitations of the emergency and the absence of medical personnel established by the government. Legal protection for the community for the act of circumcision performed by nurses on self-nursing practice in Purworejo regency has not been implemented in accordance with the principle of legality and legal certainty.

Keyword : authority, nurse, circumcision

³ Postgraduate Student, Master of Health Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta

⁴ Lecture in Master study program health law graduate faculty of law, Gadjah Mada University Yogyakarta